

Volume 4 Nomor 2 November 2019

e-ISSN 2541-0938
p-ISSN 2657-1528

JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME
4

NOMOR
2

SINTANG
NOVEMBER
2019

e-ISSN
2541-0938
p-ISSN
2657-1528

**DAMPAK PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) TERDAHAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PELIMPING BARU
KECAMATAN KELAM PERMAI**

Kardius Richi Yosada

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

Email: richiyosada78@gmail.com

Diterima: 3 September 2019; Disetujui: 23 Oktober 2019; Diterbitkan: 1 November 2019

Abstract: *This research aimed to determine the implementation of society empowerment for poor households through productive economic business groups, program efforts that realized, society's response, the level of success, and impact on society. This research used descriptive qualitative naturalistic methods. Data collection uses interviews, observation, and documents. Analysis techniques using (1) data reduction, (2) data display, (3) drawing conclusions. Research results showed that the implementation of society empowerment through productive business groups is still focused on fund rolling activities, which causes other activities not to be carried out optimally, especially administration of group members, so the development of these activities needs to be increased. Society's response to this activity. This is support by increased income and benefits derived by members. As for the perceived impact of the results of empowerment through this business group, the members feel positively helped in their business capital, while the negative impact is the dependence of members on government loan assistance so that it is difficult to be independent in developing their business, so it is necessary to pursue clear and decisive stages in deciding revolving fund loans with a curve system*

Keywords: *Productive Economic Business Programs, Society Welfare*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bagi rumah tangga miskin melalui kelompok usaha ekonomi produktif, upaya-upaya program yang telah terealisasi, respon masyarakat, tingkat keberhasilan dan dampak bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif naturalistik. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisa menggunakan (1) Reduksi data, (2) Tampilan data, (3) Pengambilan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha produktif masih terfokus pada kegiatan pengguliran dana yang menyebabkan kegiatan lainnya tidak dapat terlaksana secara optimal terutama administrasi anggota kelompok, maka pengembangan dari kegiatan ini perlu ditingkatkan.. Respon masyarakat pada kegiatan ini secara positif. Adapun dampak yang dirasakan dari hasil pemberdayaan melalui kelompok usaha ini secara positif anggota merasa terbantu dalam permodalan usahanya, sedangkan dampak negatif yaitu ketergantungan anggota terhadap bantuan pinjaman pemerintah sehingga sulit untuk mandiri dalam mengembangkan usahanya sehingga perlu diupayakan tahapan-tahapan yang jelas dan tegas dalam memutus pinjaman dana bergulir dengan sistem kurva

Kata Kunci: *Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Kebutuhan yang mendorong usaha pembangunan bangsa dan negara adalah perbaikan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis dan multidimensional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir bathin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan nasional merupakan kewajiban seluruh komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia, namun terlebih lagi merupakan tugas dan kewajiban pemerintah, karena pemerintah merupakan roda penggerak dan pemegang kebijakan dalam kemajuan suatu negara. Menurut Edi (2007), pembangunan di segala sektor dapat tercapai, apabila terdapat peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (*public welfare*).

Kemiskinan merupakan persoalan utama penghambat pembangunan nasional dan faktor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu negara. Masalah kemiskinan perlu dipecahkan, walau pemenuhan hak-hak dasar untuk menekan angka kemiskinan merupakan prioritas. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, negara maju tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* (GDP) dan Produk Nasional Bruto/*Gross National Product* (GNP) mereka relatif tinggi.

Menekan angka kemiskinan tidaklah mudah karena bukan sekedar masalah mengalokasikan dana ke sektor tersebut, namun lebih kepada bagaimana mengelola anggaran pembangunan melalui program-program inovatif yang dapat

mencapai sasaran secara efektif. Penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program Keluarga Berencana (KB), pengucuran dana inpres pendidikan, kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Program berskala nasional yang bertujuan untuk melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang disenergikan dengan sistem otonomi daerah adalah melaksanakan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pengelolaan bantuan UEP diarahkan untuk pengembangan dan penggerak sektor ekonomi yang merupakan salah satu kekuatan sendi dalam upaya pengentasan kemiskinan. UEP merupakan kegiatan masyarakat desa di sektor riil, bisa berupa produksi suatu bahan, barang, bidang penjualan, atau pemasaran maupun bentuk jasa. Program-program pemberdayaan sumberdaya manusia telah dilakukan pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka pembangunan harus merupakan perubahan sosial yang tidak hanya terjadi pada taraf kehidupan masyarakat belaka tetapi juga

pada peranan unsur-unsur didalamnya. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan terutama yang diderita oleh kaum miskin merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penanganan kaum miskin tidaklah mudah, karena kaum miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama. Kaum miskin mengalami keterbatasan dalam hal pendidikan, keterampilan, sarana usaha serta modal usaha. Tawaran kredit UMKM dari pengusaha dan perbankan sulit diakses oleh kaum miskin, karena keterbatasan kemampuan dan asset yang dimiliki. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial berusaha menemukan pola yang efektif agar kaum miskin dapat memperoleh akses modal usaha tanpa agunan dengan tetap mendorong tanggungjawab bersama

melalui pola terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi kaum miskin merupakan salah satu program yang dikembangkan pemerintah melalui dinas sosial. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro KUBE Sejahtera yang didirikan di setiap desa miskin/ terpencil untuk memfasilitasi modal usaha bagi KUBE-KUBE kaum miskin : bekerjasama dengan PINBUK sejak tahun 2003. Melalui KUBE diharapkan masyarakat miskin dapat mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Pelimping Baru terdiri dari 2 Dusun dengan 120 Kepala Keluarga yang sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani ladang dan karet. Hanya 0,5% saja warga masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri, 1% sebagai pegawai swasta, 0,7% sebagai wirausaha. Hal demikian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak stabil sebab sangat tergantung pada harga getah karet. Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pada Program Usaha Ekonomi Poduktif di Desa Pelimpin

Baru dengan modal semampunya setiap Kepala Keluarga juga kelompok usaha tertentu. Adapun bidang usaha yang dipilih beragam diantaranya: Sembako, kuliner dan sayuran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat diketahui seberapa efektif Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai alternatif upaya pemberantasan kemiskinan khususnya di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

KAJIAN TEORI

Program UEP diharapkan dapat memecahkan permasalahan permodalan yang dialami RTM di Kecamatan Kerambitan, serta dapat membantu masyarakat dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Program UEP dikatakan sukses meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan RTM serta mampu mengurangi kemiskinan, apabila program UEP mampu menunjukkan efektivitas kerja baik dan menghasilkan output sesuai dengan harapan. Penyaluran dana bergulir UEP dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/319/SJ tanggal 14 Pebruari 2003, dilakukan oleh lembaga Pelaksana Program Kecamatan (PPK) tingkat kecamatan. PPK dalam menyalurkan dana berkerjasama dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang

memiliki kinerja cukup sehat. PPK menyediakan pendanaan agar LPD dapat memperluas jangkauan pelayanan pinjamannya kepada golongan masyarakat miskin di wilayahnya. Dengan demikian, masyarakat miskin yang mendapatkan tambahan modal usaha melalui program UEP diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan RTM. Muara dari adanya peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan RTM adalah makin berkurangnya angka kemiskinan dan selanjutnya dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat.. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Dengan adanya intruksi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, segera mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan melibatkan menteri-menteri terkait. Selanjutnya gubernur dan bupati/wali kota beserta jajaran setingkat kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program bantuan rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah masing-masing.

Kesempatan kerja menurut Hendriksen (2010), merupakan suatu

keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja atau adanya permintaan dan penawaran kerja. Besarnya kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor, di antaranya; pertumbuhan output, tingkat upah dan harga-harga dari faktor produksi lainnya. Besarnya kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor seperti, pertumbuhan output, tingkat upah dan harga-harga dari faktor produksi lainnya. Hubungan antara pertumbuhan output dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan melalui hubungan antara pasar barang dengan pasar tenaga kerja, di mana melalui mekanisme pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga (gaji). Permintaan konsumsi rumah tangga di pasar barang meningkat, maka produksi dari sisi penawaran pasar barang meningkat dan terjadilah pertumbuhan output. Bila terjadi peningkatan output di semua pasar, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mendorong masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Mubyarto (2010:37), "pendapatan merupakan penerimaan

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan”.

Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan per jam yang diterima serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Tingkat pendapatan per jam yang diterima dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan dan sumber-sumber non tenaga kerja yang dikuasai seperti tanah, modal dan teknolog. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan di bidang jasa atau produksi serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan per jam yang diterima serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, karena rumah tangga miskin umumnya tidak mengetahui secara pasti berapa pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya, sehingga untuk mengetahui adanya perubahan pendapatan dapat dihitung melalui perubahan pengeluaran rumah tangga

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995:3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30).

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai bagaimana Menciptakan Sekolah Ramah Anak. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Adapun yang menjadi Sumber Data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan, sumber-sumber yang berkiatan dan mengkaji tentang Menciptakan Sekolah Ramah Anak. Sementara Sumber Data Sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer berupa referensi tentang contoh-contoh Sekolah-Sekolah yang telah berhasil Menciptakan

Sekolah Ramah Anak. Data Penelitian akan dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisa Data Model Interaktif Milles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan program usaha eefektivitasn pelaksanaan program bantuan UEP dalam upaya peningkatan RTM di kecamatan kerambitan memberi manfaat yang cukup efektif walaupun jumlah peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan relatif kecil. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan responden yang masih rendah berpengaruh terhadap pengelolaan usaha serta berdampak terhadap pendapatan responden. Pendidikan yang rendah terjadi karena terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan terbatas, tingginya beban biaya pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan terbatas, dan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Walaupun RTM pemanfaat program bantuan UEP di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kalam Permai dilihat dari segi pendidikannya rendah, akan tetapi yang bersangkutan memiliki keinginan untuk belajar. Sehingga lewat adanya bantuan dan bimbingan yang dilakukan petugas, maka RTM pemanfaat program bantuan

UEP dapat dengan baik menerima informasi yang disampaikan. Berkat adanya bantuan dan bimbingan yang dilakukan petugas, dapat membantu RTM penerima manfaat untuk mengelola serta mengembangkan bantuan dengan membuka usaha yang kreatif dan produktif.

Usaha Ekonomi Produktif dari beberapa bidang diantaranya Toko Sembako, Kuliner Jajanan Sekolah dan kerajinan tangan di Desa Pelimping Baru Kecamatan Kalam Permai banyak memberikan manfaat khususnya bagi perkembangan perekonomian Rumah Tangga di Desa tersebut. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya Program Usaha Ekonomi Produktif berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan sebagai berikut:

- a. Menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Melalui program Usaha Ekonomi Produktif yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di desa Pelimping Baru maka dampak yang pertama-tama dirasakan masyarakat adalah secara ekonomi pendapatannya bertambah, artinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- b. Memotivasi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang

produktif untuk membiayai anak dan cucunya dalam bidang pendidikan.

Selain kesejahteraan meningkat, masyarakat juga diberdayakan khususnya pada bidang wirausaha. Kelompok masyarakat didampingi dalam merintis dan mengembangkan usahanya sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan k

Produktivitas masyarakat terealisasi lebih maksimal. Masyarakat tidak hanya berharap pada bantuan pemerintah melalui program PKH dari Dinas Sosial melainkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan produktif.

- c. Menambah ilmu pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dalam bidang seni keterampilan.

Dalam proses pendampingan, tutor juga memberikan pembekalan dan sosialisasi serta sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan sehingga selain terampil berwirausaha masyarakat juga mendapat pembelajaran tentang teori-teori wirausaha sehingga dapat mengelola usaha dengan baik dan berkesinambungan.

Adapun dukungan dari pemerintah Desa sejauh ini masih pada dukungan moril dimana secara modal kelompok usaha menyediakan modal sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok usaha tersebut. Bagian dari

kelompok Usaha terdiri dari 1 Kepala Keluarga, beberapa kepala keluarga atau juga kelompok ibu-ibu. Bidang usaha yang digelutipun beragam disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok usaha. Variasi jumlah modal dan bidang usaha sangat mempengaruhi seberapa besar keuntungan yang diperoleh setiap kelompok usaha.

PENUTUP

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha produktif masih terfokus pada kegiatan pengalangan dana yang menyebabkan kegiatan lainnya tidak dapat terlaksana secara optimal terutama administrasi anggota kelompok, maka pengembangan dari kegiatan ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya program yang dilaksanakan meliputi dua jenis usaha, yaitu industri dan perdagangan, maka diperlukan peningkatan untuk jenis usaha dan ketrampilan yang lain dengan memberikan pelatihan baik administrasi dan ketrampilan bagi anggota. Respon masyarakat pada kegiatan ini secara positif dapat ditunjukkan dengan bertambahnya anggota kelompok hal ini terdorong oleh peningkatan pendapatan dan manfaat yang diperoleh anggota. Adapun dampak yang dirasakan dari hasil pemberdayaan melalui kelompok usaha ini secara positif anggota merasa terbantu dalam permodalan

usahanya, sedangkan dampak negatif yaitu ketergantungan anggota terhadap bantuan pinjaman pemerintah sehingga sulit untuk mandiri dalam mengembangkan usahanya sehingga perlu diupayakan tahapan-tahapan yang jelas dan tegas dalam memutus pinjaman dana bergulir dengan sistem kurva

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, Tan, M.G., dan Soemardjan, S, 1980, Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta:YIIS
- Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE.Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2006. Pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM)
- Ellis, G.F.R. 1984. The Dimension of Poverty dalam Social Indicator Research
- Esmara, H. 1986. Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Gramedia
- Kempton, J. 1995. Human Resource Management and Development. London:MacMillan Press Ltd
- Moeljanto, T. 1996. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mubyarto. 1998. Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Yogyakarta.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2005. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Yogyakarta: UGM.
- Suharto Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. Tadjuddin, Noer Effendi. 1995. Sumber Daya Manusia Peluang Kerfa dan Kemiskinan. Cetakan 11. Yog : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Todaro, Michael P.2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Wirawan, 2011. Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi) Contoh Aplikasi Program: Pengembangan Sumber Daya Vol: 5 No: 1 Tahun: 2015 Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks. Jakarta: Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, P. 1983. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid I. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Zadjuli, Imam Suroso. 1995. Penanggulangan Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya. Surabaya: Universitas Airlangga